



# Dinanti Pembahasan APBD 2020

## ■ Pimpinan DPRD Kota Yogya Ditetapkan

  
*Kita upaya-  
kan minggu  
keempat  
September  
bisa running  
pembahas-  
an APBD  
(APBD  
2020).*

**Danang  
Rudiyatmoko**

**YOGYA, TRIBUN** - Rapat paripurna (rapur) penetapan Calon Pimpinan Sementara DPRD Kota Yogyakarta digelar Selasa (10/9). Pada rapur tersebut menetapkan Danang Rudiyatmoko dari Fraksi PDI Perjuangan sebagai ketua, HM Fursan dari Fraksi PAN sebagai wakil ketua 1, dan Dian Novitasari dari Fraksi Gerindra sebagai wakil ketua 2.

Danang Rudiyatmoko sesuai penetapan tersebut mengatakan, targetnya Senin (16/9) pihaknya akan mengumpulkan seluruh fraksi untuk melakukan persiapan pembentukan alat kelengkapan (alkap) DPRD Kota Yogyakarta. Alkap tersebut meliputi Komisi A, B, C, dan D, serta Badan Kehormatan (BK), Badan Pembentuk Peraturan Daerah (Bapemperda).



TRIBUN JOGJA/KURNIAHUL HIDAYAH  
**BERFOTO** - Wali dan Wakil Wali Kota Yogyakarta berfoto bersama pimpinan sementara DPRD Kota Yogyakarta periode 2019-2024.

## Dinanti-Pembahasan APBD

● Sambungan Hal 9

Badan Anggaran (Banggar), dan Badan Musyawarah (Bamus).

"Sekaligus menunggu SK Gubernur tentang pimpinan DPRD. Begitu SK turun, tidak begitu lama, alkap terbentuk. Kita upayakan minggu keempat September bisa *running* pembahasan APBD (APBD 2020)," ujarnya.

Danang mengatakan, eksekutif/Pemkot Yogyakarta telah menyerahkan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pengantar untuk pembahasan APBD 2020. Ia menyebut, di pertengahan pembahasan KUA PPAS ada orientasi anggota DPRD

Kota Yogyakarta.

"Kurikulumnya sudah mengacu pada konteks anggaran dan tupoksi DPRD. Kalau sudah mengetahui struktur dan postur, pembahasan tidak banyak kendala. Dinamika pasti karena sebagai lembaga politik. Namun dengan sisa waktu yang ada, Oktober *running*, 60 hari cukup," ucapnya optimis.

Ia menjelaskan bahwa saat ini terdapat 7 raperda, termasuk di dalamnya pembahasan terkait APBD 2020, yang menjadi tugas dari legislatif periode 2019-2024. Ia mengatakan bahwa pembahasan anggaran dan raperda yang lain bisa dilakukan beriringan mengingat penggunaan ruang yang berbeda. Mulai dari raperda di ruang pansus, anggaran di banggar, ruang rapat paripurna, serta komisi.

"Tergantung kesiapan materi juga. Pansus tergantung materi 7 raperda apakah nanti memungkinkan, kalau materi siap, kita laksanakan. Nanti yang masuk bapemperda bisa kita saring dan disesuaikan dengan mekanisme," ujarnya.

**Solid**

Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, mengucapkan selamat atas penetapan ketiga sosok yang menjadi pimpinan dewan periode 2019-2020. Ia berharap dengan adanya pimpinan definitif ketika SK Gubernur sudah turun nantinya, maka hubungan antara eksekutif dan legislatif bisa semakin solid dan semua agenda pemerintahan serta agenda di dewan juga bisa terpenuhi dengan baik. "Termasuk pembahasan dengan eksekutif, khususnya di bidang anggaran," ungkapnya, ditemui

sesuai rapat paripurna, Selasa (10/9).

Terkait pembahasan APBD 2020, Haryadi menjelaskan bahwa pihaknya telah menyerahkan proposal atau Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) kepada DPRD Kota Yogyakarta.

"Semoga agenda pembahasan APBD murni 2020 bisa segera dibahas sesuai waktu. Masih ada cukup waktu," ungkapnya.

Haryadi juga berharap, ke depan hubungan eksekutif dan legislatif berjalan dengan baik sehingga hak-hak masyarakat tidak ada yang terbelenggu maupun terganggu akibat tidak harmonisnya hubungan eksekutif dan legislatif. "Semoga lancar dan baik semua, agenda tepat waktu, konstruktif, dan produktif," tutupnya. (kur)

## Bentuk Alkap Sesuai Kompetensi

**KETUA** Program Doktor Politik Islam Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Dr Zuly Qodir, menjelaskan bahwa Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta harus memiliki komunikasi politik yang baik. Mereka harus bisa memastikan bahwa alat kelengkapan (alkap) DPRD Kota

● ke halaman 15

- Pihak eksekutif berharap hubungan dengan legislatif semakin solid pada periode ini.
- Eksekutif pun telah menyerahkan KUAPPAS dan diharapkan pembahasan APBD 2020 bisa tepat waktu.

## Pekerjaan Rumah

- DPRD Kota Yogya periode 2019-2024 masih memiliki sejumlah pekerjaan setelah resmi ditetapkan.
- Ada 7 raperda yang mesti dibahas termasuk APBD 2020.
- Pimpinan sementara pun dinanti tugas membentuk alat kelengkapan dewan.
- Mulai dari Komisi A, B, C, dan D, juga Badan Kehormatan, Bapemperda, Banggar, dan Bamus.

GRAFIS/FAUZIA RAHMAN

## Bentuk Alkap Sesuai

● Sambungan Hal 9

Yogyakarta tidak didominasi oleh segmen politik tertentu.

"Kalau itu terjadi (dominasi), maka tensi politik saat Pemilu kemarin akan muncul di tengah kinerja dewan lima tahun ke depan dan itu tidak baik," ujarnya kepada *Tribun Jogja*, Selasa (10/9).

Zuly menegaskan, harus ada pembagian porsi yang cukup adil pada alkap yang melibatkan seluruh frak-

si di DPRD Kota Yogyakarta. Pembagian juga berdasarkan pada kompetensi dan kepiawaian anggota sehingga alkap yang terbentuk benar-benar bisa mendukung kinerja legislatif dan eksekutif.

"Tidak boleh ada egoisme antarkekuatan parpol karena bagaimanapun mereka telah dipilih dan sekarang menjadi anggota dewan dan akan menyusun alkap. Itu bukan untuk kepentingan partainya saja, tapi untuk masyarakat," urainya.

Zuly menjelaskan, sektarianisme politik tidak boleh ada dalam DPRD Kota Yogyakarta.

Kedewasaan berpolitik dibutuhkan bersama pimpinan dewan serta alkap. Terebih separuh dari anggota DPRD Kota Yogyakarta ini merupakan wajah-wajah lama.

"Kalau tidak sektarian, adalah sebuah keuntungan. Mereka saling kenal jadi tidak perlu penyesuaian diri terlalu lama dari partai apa pun. Tapi akan jadi masalah kalau egoisnya muncul. Kadang orang yang terlalu lama dan berpengalaman, begitu ada orang baru dianggap tidak ngerti apa-apa. Padahal orang baru ini bisa saja memiliki gagasan baru tapi kare-

na ditekan jadi malas untuk terlibat," urai Zuly.

Terkait APBD, ia menekankan bahwa APBD harus benar-benar berpihak pada kepentingan serta keberpihakan masyarakat luas. "Mereka (masyarakat) yang berjasas sehingga mereka (dewan) terpilih. APBD harus dikembalikan kepada belanja masyarakat dan bukan justru menguntungkan dewan. Peran masyarakat dan pers dibutuhkan untuk mengawasi penyusunan APBD apakah sudah benar untuk kesejahteraan masyarakat," bebernya. (kur)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat DPRD Kota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005